

Peranan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan pajak daerah dan faktor faktor yang mempengaruhinya di pemerintahan kota Surakarta

Anton Atmaji
F.1102006

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Cepatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya stabilitas, dan pemerataan pembangunan merupakan modal yang paling penting dalam memasuki pembangunan bangsa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi penting untuk mempercepat kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya kesejahteraan tercapai secara baik jika tercipta stabilitas nasional yang mantap. Aspek pemerataan dapat mempersempit kesenjangan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga meningkatkan keadilan sosial. Dengan demikian, dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih besar bagi peningkatan kegiatan pembangunan. (Nota Keuangan dan RAPBN,1999:BabIII,Hal 213)

Dalam Repelita VI, sasaran pertumbuhan ekonomi diproyeksikan oleh pemerintah sebesar rata-rata 5% per tahun, sehingga penerimaan dari sektor perpajakan perlu ditingkatkan karena penerimaan dari sektor migas cepat atau lambat harus digantikan. Sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional, peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah tetap mendapatkan perhatian yang cukup besar. Dalam hal ini dengan selalu mendasarkan kepada

rencana pembangunan lima tahun. Pembangunan nasional diarahkan kepada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya antara daerah, di samping mencapai tingkat pembangunan yang cukup tinggi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi. Untuk mencapai tingkat pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar yang diperoleh melalui mobilisasi dan masyarakat dari investasi yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik tingkat I maupun tingkat II. Peranan APBD setiap tahunnya terus diusahakan untuk semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan pengeluaran daerah (Davos,Nick,1989:220)

Peranan keuangan daerah yang semakin meningkat hendak dicapai melalui berbagai upaya perbaikan dalam sektor keuangan daerah, yang diarahkan agar pembangunan di daerah dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang sekaligus berarti meningkatkan perekonomian nasional, sebagaimana digariskan dalam Properda.

Perkembangan realisasi penerimaan daerah tingkat II dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang relatif cepat. Penerimaan daerah tingkat II selama beberapa periode mengalami peningkatan.

TABEL 1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH SURAKARTA

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Per Tahun
1999	19.888.069.111
2000	21.913.828.479
2001	35.640.533.633
2002	44.938.084.099

Sumber : Jawa Tengah dalam angka 2003 (BPS. Surakarta)

Tingkat pertumbuhan yang tinggi akan tetap diupayakan di masa-masa yang akan datang, sehingga akan semakin memperkuat pelaksanaan otonomi, yang dititikberatkan pada daerah tingkat II sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Bertumpu pada Daerah Tingkat II, diharapkan agar penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, mengingat bahwa kedudukan daerah tingkat II lebih langsung berhubungan dengan masyarakat.

Kebijaksanaan di bidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sendiri, diprioritaskan pada penggalian dan mobilisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), disamping bagi hasil pajak dan bukan pajak, subsidi dan bantuan serta pinjaman pemerintah daerah dan BUMD untuk menunjang usaha-usaha peningkatan sumber pendapatan daerah.

Pajak reklame merupakan salah satu komponen yang cukup potensial dalam menyumbang PAD (Davey,K.J,1988:110) PAD merupakan andalan daerah, bagi daerah perkotaan dengan denyut kegiatan ekonomi yang cukup baik seperti Surakarta, reklame merupakan sektor yang cukup penting dan potensial. Karena itu, sumbangan pajak reklame cukup besar terhadap PAD Surakarta.

Untuk melaksanakan pembangunan, Pemda Surakarta giat melaksanakan pemungutan Pajak Reklame yang kadang-kadang mengalami hambatan. Mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak reklame ini sering mengalami hambatan, sehingga peningkatan Pajak Reklame sulit diwujudkan. Padahal Pajak Reklame sangat

berperan dalam pembangunan, karena itu jika ada hambatan dalam pemasukan dana Pajak Reklame tentu akan menghambat pembangunan daerah. Karena secara integral pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan pemerintah pusat, maka terhambatnya pembangunan daerah Kotamadya Surakarta juga merupakan hambatan bagi pembangunan negara (DIPENDA Pemerintahan Kota Surakarta)

Makin giat denyut ekonomi disuatu daerah, makin besar pula kegiatan reklame di daerah itu, dan hal ini berarti potensial untuk pajak reklame. Untuk itu, berarti potensial pula untuk meningkatkan PAD daerah tersebut, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan potensial untuk pembangunan daerah.

Dari uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan pajak reklame dalam meningkatkan PAD di Kotamadya Surakarta dengan mengambil judul "Peranan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Surakarta".

Perumusan Masalah

Pajak reklame merupakan sumber penerimaan daerah yang dianggap potensial. Peningkatan penerimaan pajak reklame terus diupayakan melalui perbaikan-perbaikan mulai dari kebijakan sistem administrasi sampai pada resiko yang dihadapi, upaya tersebut tetap diselaraskan dengan kelancaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui :

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah agar pajak reklame setiap tahunnya selalu meningkat sesuai yang ditargetkan?
2. Bagaimana prospek penerimaan dari pajak reklame di masa mendatang?

3. Bagaimana pengaruh Tingkat Jumlah Perusahaan, Jumlah penduduk, dan PDRB terhadap Pajak reklame di Kota Surakarta?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut tujuan yang dicapai dari penelitian tentang Pajak Reklame ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame secara efisien, efektif dan ekonomis.
2. Ingin mengetahui Prospek penerimaan dari Pajak Reklame di masa mendatang.
3. Ingin mengetahui hubungan antara pajak reklame dengan PDRB, jumlah penduduk dan Jumlah Perusahaan Kecil, Menengah dan Atas.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan referensi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan penerimaan daerah terutama Pajak Reklame.

2. Bagi Peneliti

Merupakan tambahan pengetahuan secara nyata dan pengaplikasian teori yang diperoleh di bangku kuliah.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan masukan bagi para mahasiswa yang ingin memahami masalah yang berkaitan dengan peranan Pajak Reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Reklame merupakan salah satu bagian dari berbagai macam pajak daerah, di mana pajak reklame dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah sebagai hasil dari Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak Reklame sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi target untuk membiayai pengeluaran daerah. Sesuai dengan perkembangan perekonomian yang semakin membaik sehingga banyak Investor menanamkan modalnya sehingga jelas ini akan menambah Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Reklame.

2. Pengaruh PDRB terhadap Pajak Reklame

PDRB merupakan penghasilan kotor penduduk dari berbagai sektor ekonomi. Kenaikan PDRB akan menandai kemakmuran penduduk, dengan kenaikan penghasilan itu, dimungkinkan penduduk akan terus berinvestasi (mendirikan perusahaan). Sehingga dengan bertambahnya PDRB, diperkirakan sangat berpengaruh terhadap Pajak Reklame.

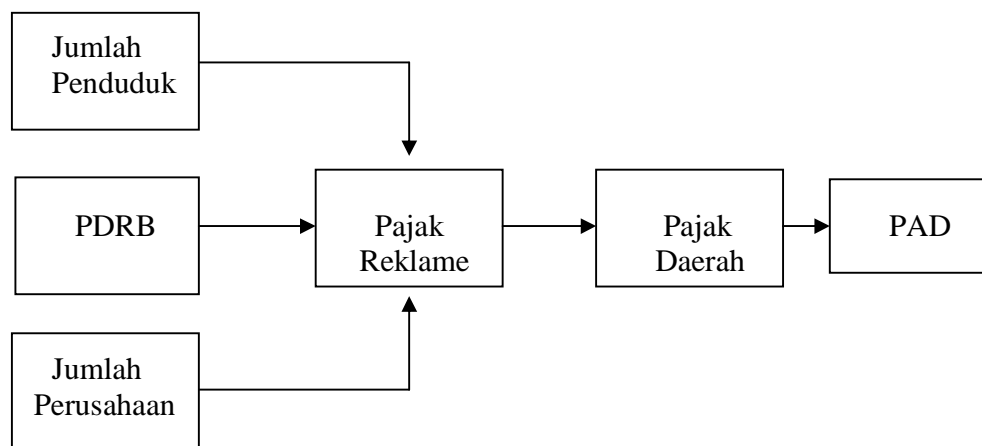
3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Reklame

Dengan Jumlah Penduduk yang banyak disuatu wilayah tertentu, maka aktivitas perekonomian di daerah tersebut juga tinggi, karena banyak kebutuhan manusia yang harus terpenuhi, maka banyak bermunculan para penawar barang maupun jasa. Dalam menawarkan barang atau jasa tersebut dibutuhkan suatu promosi

produk, sehingga dalam berpromosi tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan, dikenai pajak. Dengan demikian diperkirakan Jumlah Penduduk sangat mempengaruhi besarnya Pajak Reklame.

4. Pengaruh Jumlah Perusahaan (Badan) terhadap Pajak Reklame

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, dimana suatu badan tersebut jika ingin meningkatkan pendapatannya ada beberapa cara atau strategi yang harus dilakukan, salah satunya adalah mengadakan promosi atau iklan produk (menyelenggarakan reklame). Semakin banyak Jumlah Perusahaan disuatu daerah semakin banyak pula Reklame yang dibutuhkan oleh badan yang bersangkutan untuk menawarkan produknya. Dengan kata lain Jumlah Perusahaan berpengaruh terhadap Pajak Reklame.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:**1. Dependen Variabel:**

Jumlah Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Pajak Daerah

2. Independen Variabel:

- a) Jumlah Penduduk Kota Surakarta.
- b) Jumlah PDRB di Kota Surakarta dari masing-masing sektor.
- c) Jumlah Perusahaan (Pengusaha kecil, menengah, besar).

F. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu kesimpulan sementara tentang perilaku variabel-variabel dalam model yang digunakan, yang akan dibuktikan kebenarannya melalui surat uji statistik. Berkenaan dengan hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini adalah :

- 1. Peranan penerimaan Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Pajak Daerah diduga akan semakin meningkat bila pelaksanaan pemungutan pajak reklame telah dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis.
- 2. Prospek Pajak Reklame Diduga semakin baik untuk tahun-tahun mendatang.
- 3. PDRB dan Jumlah Perusahaan diduga berpengaruh secara signifikan terhadap sumbangan Pajak Reklame

G. Metodologi Penelitian**1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kota Surakarta.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data adalah dari kantor pemerintah kota Surakarta, Badan Pusat Statistik, DIPENDA, dan literatur lain yang mendukung.

3. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen

Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut atas adanya reklame yang dikenakan.

b. Variabel Independen

- 1). PDRB kota Surakarta pertahun yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di Kotamadya Surakarta dalam periode waktu tertentu.
- 2). Jumlah penduduk kota Surakarta pertahun berdasarkan kelompok umur dari masing-masing kecamatan.
- 3). Jumlah Perusahaan yaitu jumlah badan/ perusahaan yang berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

4. Teknik Analisis Data

Untuk membuktikan Hipotesis yang diajukan, digunakan alat bantu berupa:

a. Analisis Matriks Kontribusi dan Pertumbuhan (untuk menjawab hipotesis I)

yaitu meliputi:

1. Perbandingan antara pertumbuhan pajak reklame dengan rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah untuk mengetahui pertumbuhan pajak reklame.
2. Perbandingan antara jumlah pajak reklame dengan jumlah Pajak Daerah untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah.

Berikut ini adalah Tabel Kriteria Perkembangan Pajak Reklame:

Kontribusi Pertumb	$\frac{\sum PR}{rPR} > 1$	$\frac{\sum PR}{rPR} < 1$
$\frac{\Delta PR}{\Delta PAD} > 1$	Prima	Berkembang
$\frac{\Delta PR}{\Delta PAD} < 1$	Potensial	Terbelakang

b. Analisis Model Trend Linear (untuk menjawab hipotesis II)

Bentuk Umumnya adalah : $Y = a + bx$ (1.1)

Dimana:

Y = Penerimaan dari sektor pajak reklame

x = jumlah tahun

a = konstanta

b = koefisien arah atau slop trend linear

Untuk mencari koefisien a dan b digunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{N} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} \quad \dots\dots\dots(1.2)$$

Tetapi sebelum dilakukan analisis trend terlebih dahulu melakukan regresi terhadap koefisien X dan Y untuk mengetahui apakah keduanya signifikan apa tidak.

Tujuan digunakannya trend linear adalah sebagai peralatan untuk melihat perkembangan trend dari hubungan variabel Y dan x, dimana perkembangan arah hubungan tersebut tergantung pada koefisien b.

- Apabila $b < 0$, maka perkembangan trend dari pada pajak reklame di daerah tersebut menurun.
- Apabila $b > 0$, maka perkembangan trend dari pada pajak reklame di daerah tersebut naik.

c. Analisis Ekonometrik

selanjutnya untuk menjawab hipotesis III dilakukan pengujian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisi Regresi Linear Berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Jumlah penduduk, PDRB, Banyaknya Pengusaha kecil menengah dan atas) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini Pajak Reklame). Adapun model regresi diformulasikan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e_i \quad \dots (1.3)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah dalam Hal ini Pajak Reklame

X_1 = Jumlah Penduduk

X_2 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

X_3 = Banyaknya Pengusaha kecil menengah dan atas

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

e_i = Pengganggu (error)

2. R^2 (Koefisien Determinasi)

Untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Semakin besar R^2 menunjukkan estimasi akan semakin mendekati kenyataan yang sebenarnya.

Koefisien determinasi dapat ditulis sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\sum X_i^2}{\sum Y_i^2} - \frac{(\sum X_i Y_i)^2}{\sum X_i^2 \sum Y_i^2} \quad \dots (1.7)$$

Dimana nilai R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$

3. Uji F

Uji F merupakan pengujian secara serempak bertujuan mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, dengan hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$$

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$$

Untuk menentukan besarnya F hitung digunakan rumus :

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (N - k)} \quad \dots (1.5)$$

Dengan mengikuti distribusi F dengan tingkat kebebasan $k-1$ dan $N-k$.

Untuk menentukan besarnya F tabel digunakan rumus:

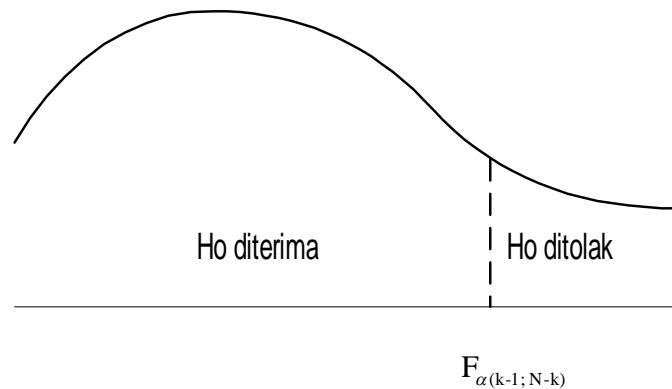
$$F\text{-tabel} = F_{\alpha(k-1; N-k)} \quad \dots (1.6)$$

dimana :

R^2 = koefisien determinasi

k = banyaknya koefisien, termasuk b_0

N = jumlah sampel observasi



Gambar 1.3 Distribusi Uji F statistik satu arah

Apabila $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi besarnya nilai variabel dependen pada tingkat signifikansi. Sedangkan apabila $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap besarnya nilai variabel dependen pada tingkat signifikansi.

4. Uji t

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen. Pengujian masing-masing regresi digunakan uji dua arah (two tail test) dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : b_1 = 0 \quad H_a : b_1 \neq 0$$

Menentukan besarnya t-hitung dengan rumus :

$$t\text{-hitung} = \frac{b_i}{Se(b_i)} \quad \dots\dots (1.7)$$

dimana :

b_i = koefisien regresi

Se = Standard error koefisien regresi

Menghitung besarnya t tabel dengan rumus:

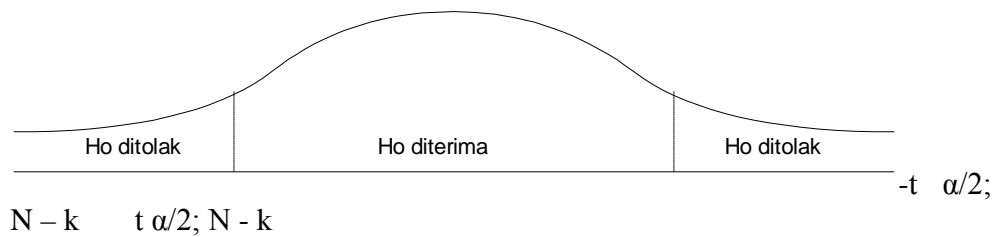
$$t \text{ tabel} = t_{\alpha/2; N-k} \quad \text{..... (1.8)}$$

dimana :

α = derajat signifikansi

N = jumlah sampel (observasi)

k = banyaknya parameter atau koefisien regresi plus konstanta



Gambar 1.2. Distribusi uji t statistik dua arah

Apabila $t \text{ hitung} > + t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh atau signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi. Begitu juga sebaliknya, apabila $t \text{ hitung} < + t \text{ tabel}$ dan $t \text{ hitung} > -t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh atau tidak signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi.

5. Uji Ekonometrik (Uji Asumsi Klasik)

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi.

Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan uji Farrar-Glauber (perhitungan ratio-F untuk menguji lokasi multikolinearitas) yaitu :

1. Meregres tiap variabel bebas atas variabel bebas yang lain. Dari regresi tersebut diperoleh R_i^2 yang cocok (R_i^2).
2. Menghitung F kritis (F_i)

$$F_i = \frac{R_i^2 / (k - 2)}{(1 - R_i^2) / (N - k + 1)} \quad \dots\dots (1.9)$$

Dengan mengikuti distribusi F dengan derajat kebebasan k-2 dan N-k+1. Dimana, N menyatakan besarnya sampel, k menyatakan jumlah variabel yang menjelaskan termasuk juga unsur intersep atau konstanta, R_i^2 adalah koefisien determinasi dalam variabel X_i atau sisa variabel lainnya. Kemudian hasil dari F_i dibandingkan F hitung.

Kalau F yang dihitung $> F_i$ kritis maka variabel bebas tersebut kolinear terhadap variabel bebas lainnya. Demikian juga sebaliknya, jika F yang dihitung $< F_i$ kritis maka variabel bebas tersebut tidak kolinear terhadap variabel bebas yang lain. Atau multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu/lebih variabel independen terdapat korelasi dengan variabel independen lainnya. Cara lain untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dilakukan pengujian dengan metode Klien, yaitu

dengan membandingkan nilai r^2 , $x_i x_j$ R_i^2 (korelasi antar masing-masing variabel independen) dengan $R^2_{y x_i x_j \dots x_n}$. Apabila nilai $R^2 > r^2$ berarti tidak ada gejala multikolinearitas dan apabila $R^2 < r^2$ berarti ada gejala multikolinearitas. (Gujarati, 1999 : 166-168).

b. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar (tetapi masih tetap tidak bias dan konsisten).

Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Hal tersebut dilambangkan :

$$E(U_i^2) = \sigma^2 \quad \text{..... (1.10)}$$

dimana :

$$\sigma^2 = \text{varian}$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

σ^2 apabila didapat varian yang sama maka asumsi homoskedastisitas (penyebarannya) diterima.

Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heterokedastisitas adalah dengan uji Park. Uji Park dilakukan dengan dua tahap regresi, yaitu:

1. Melaksanakan regresi atas model yang digunakan dengan OLS biasa tanpa memperhatikan adanya gejala heterokedastisitas, kemudian dari hasil ini diperoleh besarnya residual.

2. Nilai residual tadi dikuadratkan, lalu diregresikan dengan variabel bebas, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{In}e_i^2 = \alpha + \beta_1 \text{In} X_i \quad \text{..... (1.11)}$$

Dimana :

e_i = residual

X_i = variabel independen

Jika $H_0 : E(U_i^2) = \sigma^2$ (tidak terjadi kasus heterokedastisitas).

$H_a : E(U_i^2) \neq \sigma^2$ (terjadi kasus heterokedastisitas)

Hasil regresi tahap 2 dilakukan uji t. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah heterokedastisitas dapat dilihat pada nilai koefisien regresi pada persamaan. Jika signifikan, maka terjadi masalah heterokedastisitas. Sedangkan jika tidak signifikan, maka tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam model tersebut. (Gujarati, 1999 : 186-187).

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu periode lain sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar.

Ada tidaknya masalah autokorelasi dapat diketahui dengan uji Durbin-Watson, yaitu dengan membandingkan angka Durbin-Watson yang

diperoleh dari hasil perhitungan analisis regresi dengan angka Durbin-Watson dalam tabel dengan tingkat derajat kebebasan (N-k) dan tingkat signifikansi tertentu.

Karena model menggunakan lag dari variabel dependen maka untuk uji Durbin-Watson menggunakan uji Durbin h-statistik. Nilai h diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$h = (1 - \frac{1}{2}d) \sqrt{\frac{N}{1 - N[\text{var}(\alpha_2)]}} \quad \text{..... (1.12)}$$

dimana :

d = statistik Durbin-Watson yang biasa

N = jumlah sampel observasi

$\text{var}(\alpha_2)$ = varian koefisien dari lag Y_{t-1}

Untuk sampel besar, statistik h mengikuti distribusi normal yang distandardisasikan, yaitu distribusi normal dengan rata-rata nol (0) dan varian satu (1). Jadi tingkat penting (signifikan) secara statistik dari h yang diamati dapat dengan mudah ditentukan dari tabel distribusi normal yang distandardisasikan. (Gujarati, 1999 : 246).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Peningkatan kemampuan dan peran serta daerah memang sangat penting dalam melakukan dalam suatu pembangunan yang terintegrasi. Untuk mencapai

tujuan pembangunan tersebut pemerintah daerah masih harus didorong, maka pada akhir dekade 80-an pemerintah melempar gagasan tentang perlunya desentralisasi daerah yang lebih besar. Gejala bahwa dominasi pemerintah pusat akan dikurangi antara lain ditandai dengan usaha pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah, otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah jelas mempengaruhi fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan berbagai golongan masyarakat daerah.

Sistem administrasi pemerintah daerah di Indonesia ditandai oleh dua pendekatan dekonsentrasi dan desentralisasi (Nick Devas, 1989 : 1). Kedua pola ini berjalan seiring, dengan perangkat administrasi dekonsentrasi berjalan sejajar dengan perangkat pemerintah daerah. Dekonsentrasi menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Pasal (1) tentang Pemerintah Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Pasal (1) tentang Pemerintah daerah, desentralisasi adalah penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bentuk nyata dari pelaksanaan asas desentralisasi terbentuknya daerah otonom yang selanjutnya daerah, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berwenang serta berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kekuasaan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijaksanaan pembangunan jelas lebih terbatas, jika dibandingkan dengan kekuasaan pemerintah pusat. Bentuk campur tangan pemerintah pusat terhadap peranan pembangunan daerah pada dasarnya terwujud dalam hal-hal sebagai berikut : (Sadono Sukirno, 1985 : 117-118)

1. Peranan pembangunan daerah hanyalah merupakan pelengkap bagi pembangunan nasional. Untuk menjamin agar pembangunan daerah dapat membangun nasional, harus dilakukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunannya, pemerintah daerah harus mempertimbangkan rencana-rencana pembangunan pemerintah pusat di daerahnya.
2. Pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan dalam menjalankan kebijaksanaan moneter, sehingga harus mau menerima konsekuensi dari setiap kebijaksanaan yang dilaksanakan pemerintah pusat (Bank Sentral).
3. Pemerintah daerah juga tidak mempunyai kekuasaan menciptakan kebijakan untuk mengatur perdagangan antar daerah dan investasi semua peraturan tentang peranan modal (asing maupun dalam negeri), pengembangan sektor-sektor industri dan pertanian serta peraturan lainnya, pada umumnya ditentukan pemerintah pusat.
4. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah merupakan pelengkap bagi kebijaksanaan fiskal pemerintah pusat. Kebijakan fiskal pemerintah daerah tersebut tidak boleh menetralkan atau bertentangan dengan kebijaksanaan pusat.

B. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Untuk memperlancar pembangunan daerah, pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber penerimaan yang rutin dan kontinyu. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Pasal (79) mengenai pemerintah daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Hasil Pajak Daerah

Pungutan daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai bahan hukum publik tanpa memberikan prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan yang berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan prinsip pengelolaan berdasarkan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan asas publik service dan sebagai keuntungan wajib disetorkan ke kas daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan yang merupakan hasil dari usaha-usaha daerah selain tersebut diatas, seperti penerimaan dari dinas-dinas daerah dan penerimaan dari persewaan tanah, rumah, dan kendaraan milik pemerintah daerah.

2. Dana Perimbangan

Menurut Pasal (6) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, dana perimbangan terdiri dari :

a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum untuk daerah propinsi tertentu ditetapkan dalam APBN dengan porsi propinsi daerah yang bersangkutan. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Porsi daerah Kabupaten/Kota merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Bobot daerah ditetapkan berdasarkan :

- a) Kabupaten wilayah otonomi daerah
- b) Potensi ekonomi daerah

c. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud adalah :

- a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan/atau

b) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Dana alokasi khusus tersebut termasuk yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangannya sebagai berikut :

- i. 40% dibagi kepada daerah penghasil sebagai dana alokasi khusus
- ii. 60% untuk pemerintah pusat

Kecuali dalam rangka reboisasi, daerah yang mendapatkan pembiayaan kebutuhan khusus sebagaimana dalam ayat (2) menyediakan dana penyanggah dari APBD sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan.

3. Pinjaman Daerah

Dalam pasal (11) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, pinjaman daerah disebutkan sebagai berikut :

- a. Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagaimana anggarannya.
- b. Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat.
- c. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- d. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan asli daerah sendiri adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 22 tahun 1999) Tentang pemerintah daerah. Supaya sumber-sumber pendapatan asli daerah itu mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah maka perlu digali, ditingkatkan dan dihimpun dengan sebaik-baiknya.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan bagian penting dari kegiatan bernegara sebesar 70% dari belanja negara berasal dari pajak. Ada berbagai pengertian ahli dalam bidang perpajakan, tetapi mempunyai inti atau tujuan yang sama. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya “Pajak dan Pembangunan (Eresco, Jakarta, 1974, hal.8) pengertian pajak adalah sebagai berikut (Munawir, 1993.3).

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “publik investment”.

Berbeda dengan pengertian pajak yang diberikan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertainya yang berjudul “Pajak berdasarkan asas gotong royong” yaitu :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi

barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (S. Munawir, 1993 : 3).

Dari berbagai pengertian pajak di atas tampak bahwa pada prinsipnya pajak merupakan peralihan sebagian kekayaan kepada negara sebagai sumber keuangan negara untuk memelihara kesejahteraan umum. Ditinjau dari segi makro ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi income bagi masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masyarakat.

2. Fungsi Pajak

Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pajak, karena pajak pemungutan pajak digunakan untuk pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fungsi pajak dalam pembangunan ada 2 yaitu : (Suparmomo, 1987 : 96).

- a. Pajak sebagai alat anggaran (budgetary), yaitu sebagai sumber penerimaan negara atau sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin.

- b. Pajak sebagai alat pengatur (regulatory), yaitu terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi.

3. Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok-kelompok pajak. Adapun pengelompokan pajak adalah sebagai berikut :

a. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung (Munawir, 1990 : 27)

1. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak (Kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan (Kohir) dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala.

b. Pajak Negara dan Pajak Daerah (Suparmono, 1987 : 96)

1. Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah yang dilakuan oleh Kantor Pelayanan Pajak, dan hasilnya digunakan untuk pembinaan rumah tangga negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

D. Pajak Daerah

Agar dapat memahami arti pajak daerah dan jenis-jenisnya, berikut ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pajak daerah tersebut :

1. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah banyak dikemukakan oleh para ahli di bidang perpajakan tetapi arti dan tujuan pajak daerah dapat dirangkum sebagai berikut (Davey, 1988 : 31).

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah itu sendiri.

2. Macam-macam Pajak Daerah

Adapun jenis-jenis pajak daerah sebagaimana tertera dalam Undang-undang no. 34 Tahun 2000 dapat dinyatakan berikut ini :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak reklame

5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak parkir
7. Pajak Pengambilan bahan galian golongan C

Wewenang mengenai pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintah daerah. Sistem pajak daerah yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan disamping itu, sebagian besar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat, sehingga perlu diadakan suatu perubahan. Ada tiga tujuan yang hendak dicapai bagi perubahan pada sistem pajak daerah (Nick Divas, 1999 :57)

- a. Menyederhanakan sistem pajak daerah, karena sekarang ini sistem ini tampaknya memiliki “nilai pengganggu” (nuisance value) yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkannya. Perubahan ini bertujuan mewujudkan sistem pajak yang lebih adil.
- b. Meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.
- c. Perubahan sistem pajak juga mungkin ada, yang menyangkut wewenang pemerintah daerah.

3. Tolok Ukur Untuk Menilai Pajak Daerah

Untuk menilai berbagai daerah yang ada digunakan serangkaian ukuran, yaitu :
(Devas, 1988 : 61-62)

- a. Hasil (Yield), memadai tidak suatu pajak adalah sebagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu dan

elastisitasnya hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

- b. Keadilan (Equity), dasar pajak dan kewajiban membayar pajak harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang lebih besar dan pajak tersebut haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dalam suatu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan dalam penyediaan layanan masyarakat.
- c. Daya guna ekonomi (Economic Efficiency), pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan produsen dan pilihan konsumen menjadi salah satu arah atau orang menjadi segan menabung dan memperkecil beban lebih pajak.
- d. Kemampuan melaksanakan (Ability to implement), suatu pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politis dan kemampuan tata usaha.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (Suitability as local revenue source), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayar, dan tempat memungut pajak haruslah sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak tidaklah mudah dihindari dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan diantara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan

beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah. Selain lima hal yang disebut diatas, ada pula tiga tolok ukur hasil kebijaksanaan anggaran dalam hubungannya dengan pajak daerah yaitu :

a). Upaya Pajak

Hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Pengukuran lazim digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

b). Hasil Guna

Mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dan potensi hasil pajak masing-masing.

Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak menentukan wajib pajak, menentukan nilai kena pajak, memungut pajak dan melakukan penerimaan.

c). Daya Guna

Hal ini mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pajak yang bersangkutan, selain menutup biaya langsung dengan kantor yang bersangkutan, daya guna juga memperhatikan biaya tidak langsung bagi kantor pajak dan mungkin juga mencakup biaya luar, biaya mematuhi pajak bagi wajib pajak, itikad baik masyarakat dan sebagainya.

Daya guna akan lebih besar apabila biaya untuk menata penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak. Hal ini dapat dicapai bila penetapan pajak terhutang bersifat otomatis (misalnya, prosentase tertentu atas karcis masuk) bila beberapa pajak dapat dipungut sekaligus atau apabila kegiatan

memungut dapat dikaitkan dengan unsur tata usaha lain. Semakin kecil pungutan, semakin besar biaya memungut. Biaya memungut besar sekali jika pajak harus dipungut dari rumah ke rumah, sedangkan bila wajib pajak harus datang membayar ke kantor pajak, hal ini tiada lain menggeser beban ke pundak wajib pajak dan hasil pajak mungkin kecil.

E. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Selanjutnya untuk menjelaskan pajak reklame dapat diuraikan hal-hal berikut :

Pajak reklame adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang atas penyelenggaraan reklame. Dasar hukum dalam pemungutan pajak reklame adalah Perda nomer 5 tahun 1999. Yang mana reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan dan memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum pada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Subyek dan Obyek Pajak Reklame

- a. Subyek pajak reklame adalah Orang atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

- b. Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, kecuali penyelenggara reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan yang sejenisnya.

3. Sistem Pemungutan Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas perijinan untuk memasang reklame, artinya tanda bayar reklame merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh ijin pemasangan reklame, sehingga Pajak Reklame harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum ijin dikeluarkan. Jenis-jenis Pajak Reklame :

a. Reklame Papan

Yaitu, merupakan reklame yang menggunakan papan atau yang sejenis menunjukkan nama seseorang atau usaha perorangan baik bersama-sama maupun berupa badan usaha.

b. Reklame Kain

c. Reklame Melekat (Stiker)

d. Reklame Selebaran

e. Reklame Berjalan

f. Reklame Kendaraan

g. Reklame Peragaan

h. Reklame Udara

i. Reklame Suara

j. Reklame Film/ Slide, dan sebagainya.

Untuk mengetahui proporsi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan cara membandingkan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah.

Kegiatan pemungutan pajak reklame ini memerlukan biaya, tetapi untuk pajak reklame biaya ini merupakan biaya operasional untuk melakukan pengawasan dan penerbitan pajak reklame. Pemungutan pajak reklame dikatakan berhasil bila berdaya guna atau efisien, artinya penerimaan yang diperoleh dari pemungutan pajak reklame mampu menutupi biaya pengeluaran.

4. Perijinan Pendirian Reklame

- a. Setiap penyelenggara Reklame harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Walikota Surakarta.
- b. Untuk mendapat ijin penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Surakarta dengan mengisi formulir yang telah disediakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
- c. Dalam pemasangan Reklame diatas tanah/ gedung/ bangunan milik pemerintah harus dilampirkan surat persetujuan dari Kepala Instansi.

5. Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame

- a. Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- b. Nilai Sewa Reklame dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak
- c. Tarif dasar nilai strategis ditetapkan dengan keputusan Walikota Nomor 03/Drt/1999 tanggal 27 Desember 1999 sebagaimana tertera pada tabel di bawah.

- d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Sewa Reklame.

Lampiran V : Keputusan Walikota Surakarta
Tanggal : 27 Desember 1999
Nomor : 03/Drt/1999

TABEL 2.1
PENETAPAN NJOP REKLAME BOARD

NO.	JENIS REKLAME (out door) Per m ²	KONSTRUKSI	NON KONSTRUKSI
1.	BERSINAR		
	a. > 51	Rp. 225.000,-	Rp. 115.000,-
	b. 26 – 50	Rp. 175.000,-	Rp. 90.000,-
	c. 11 – 25	Rp. 125.000,-	Rp. 75.000,-
	d. 1 – 10	Rp. 75.000,-	Rp. 40.000,-
2.	TIDAK BERSINAR		
	a. > 51	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-

	b. 26 – 50	Rp. 150.000,-	Rp. 75.000,-
	c. 11 – 25	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
	d. 1 – 10	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-
3.	MULTIVISION		
	a. > 51	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	b. 26 – 50	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-
	c. 11 – 25	Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,-
4.	MEGATRON		
	a. > 51	Rp. 1.200.000,-	Rp. 600.000,-
	b. 26 – 50	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-
	c. 11 – 25	Rp. 750.000,-	Rp. 375.000,-

TABEL 2.2
PENETAPAN NJOP REKLAME NON BOARD

NO.	JENIS REKLAME	TAHUNAN	BULAN	MINGGU
1.	BALEHO	-	Rp. 50.000,-	Rp. 12.500,-
2.	KAIN	-	Rp. 30.000,-	Rp. 7500,-
3.	TEMPEL			
	a. Kertas	-	Rp. 10.000,-	Rp. 2.500,-
	b. Plastik	-	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-
	c. Seng	Rp. 275.000,-	Rp. 23.000,-	Rp. 6.000,-
	d. Triplek	Rp. 250.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 5.000,-
4.	BERJALAN	Rp. 200.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 4.000,-
5.	UDARA (Balon)	-	Rp. 50.000,-	Rp. 12.000,-

TABEL PENETAPAN NJOP REKLAME LAINNYA

1. SELEBARAN (per lembar)
Berwarna : Rp. 500,-
Tidak Berwarna : Rp. 250,-
2. BIOSKOP (Sekali Putar)
Reklame Film : Rp. 1.500,-
Reklame Slide : Rp. 1.000,-
3. PERAGAAN : 20% DARI Nilai Sewa
4. Khusus untuk perhitungan obyek reklame di dalam (in door) PASAR, TERMINAL dan sejenisnya, diperhitungkan dari luas : Luas Reklame x Tarif NJOP Non Board (Seng & Triplek).

- Tanpa memperhitungkan Nilai Strateginya (untuk no. 1,2 dan 3)
5. Untuk Reklame Tahunan menempel di bangunan (Non Konstruksi), perhitungan :
- Harga Dasar PBB X 25%

F. Pengeluaran Daerah

a. Pengeluaran Rutin Daerah

Dalam rangka meningkatkan tersedianya prasarana dan sarana bagi pemerintah daerah, didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jangkauannya semakin luas, serta untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaannya, maka diperlukan dana yang memadai. Jenis pengeluaran rutin daerah yang paling besar menyerap dana adalah belanja pegawai, yaitu rata-rata setiap bulan sebesar 71.2 persen dari seluruh pengeluaran rutin daerah.

1. Urusan Umum Pemerintah
2. Pekerjaan umum
3. Perhubungan
4. Kesehatan
5. Pendidikan dan Kebudayaan
6. Sosial, Perumahan dan Perburuhan
7. Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Koperasi
8. Perindustrian dan Perdagangan
9. Usaha-usaha Daerah
10. Angsuran Pinjaman/hutang dan Bunga
11. Pensiun dan Onderstand

12. Bantuan Keuangan
13. Pengeluaran tidak termasuk terbagian lain
14. Pengeluaran tidak tersangka
15. Urusan Kas dan Perhitungan

b. Pengeluaran Belanja Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab seluruh daerah berusaha melaksanakan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana diberbagai sektor.

1. Industri
2. Pertanian dan kehutanan
3. Tenaga kerja
4. Perdagangan, pengembangan dunia usaha keuangan dan koperasi
5. Transportasi
6. Pariwisata/telekomunikasi daerah
7. Pengembangan daerah dan pemukiman kembali
8. Lingkungan hidup dan tata ruang
9. Penduduk/kebudayaan nasional kepercayaan terhadap Tuhan YME pemuda dan olah raga
10. Kependudukan dan keluarga sejahtera
11. Kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja
12. Perumahan dan pemukiman
13. Agama
14. Ilmu pengetahuan dan teknologi

15. Hukum
16. Aparatur pemerintah dan pengawasan
17. Politik, penerangan, komunikasi dan media massa
18. Keamanan dan ketertiban umum

F. Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)

Bappeda dan Biro Pusat Statistik Kotamadya Surakarta (2000) mengutip definisi Produk Domestik Regional Bruto dengan "Produk Asli Penduduk di suatu daerah secara regional yang memperhitungkan seluruh penyusutan atas barang-barang modal yang tetap digunakan dalam proses produksi selama satu tahun. Perhitungan PDRB disuatu daerah dengan menjumlahkan dalam keadaan bruto produksi dari berbagai sektor usaha penduduk didaerah itu. Produk regional adalah istilah untuk produk regional netto yang dihitung atas dasar harga tetap yang tidak dipengaruhi oleh inflasi.

Klasifikasi jenis usaha berdasarkan ketentuan Tahun 2000,yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Minum
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa.

Dari nilai PDRB yang ditunjukkan suatu daerah, ditentukan kemakmuran daerah itu. Karena itu, PDRB dapat dikatakan sebagai tanda kemakmuran suatu daerah. Semakin besar pendapatan mereka, semakin besar pula PDRB yang diterima suatu daerah. Semakin besar PDRB yang dimiliki daerah itu, menunjukkan semakin makmurnya penduduk di daerah tersebut. Dengan kemakmuran tersebut penduduk akan membangun suatu tempat tinggal, sarana jalan, sarana air dan bahkan mendirikan suatu usaha (berinvestasi). Semakin banyaknya investasi disebabkan aktifitas perekonomian yang cukup tinggi sehingga secara teoritis dapat dikatakan bahwa Penerimaan PDRB dapat meningkatkan penerimaan Pajak Reklame.

G. Jumlah Perusahaan/ Badan (Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar)

1. Pengertian

Badan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik negara

dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Pesekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi SosPol atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.

Wajib Pajak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran pajak, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Dari penjelasan diatas Wajib Pajak Badan dapat diartikan sebagai Wajib Pajak yang dikenakan atas Badan yang sesuai dengan pengertian diatas yang berkewajiban membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

2. Badan atau Perusahaan sebagai pelaku ekonomi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Koperasi : Koperasi sebagai organisasi yang berwatak sosial yang merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan anggota-anggotanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi diharapkan menjadi soko guru bagi badan usaha yang lain.

2) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

BUMS menyediakan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat dengan mengambil keuntungan dari usahanya tersebut. Sektor usaha swasta merupakan sektor usaha yang ditujukan untuk pemupukan modal, guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. BUMS dapat

berkembang baik dalam bentuk usaha individu atau perorangan maupun dalam usaha bersama atau kelompok serta dapat menyerap dana baik dalam bentuk PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing).

3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN terutama bergerak dalam bidang usaha-usaha besar dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misi pokok BUMN adalah melindungi dan melayani kepentingan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 2 UUD'45 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Rasa aman dan tentram bagi masyarakat karena kebutuhan dan kepentingan terlayani oleh aneka sektor usaha negara merupakan faktor penting yang menyumbang pada stabilitas perekonomian.

BUMN dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Perusahaan Jawatan yaitu Perusahaan pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan umum dengan syarat-syarat efisien, efektifitas dan penghematan. Perjan terutama melayani kepentingan masyarakat banyak dengan penyediaan subsidi bilamana perlu.

- b) Perusaah Umum yaitu Perusahaan pemerintah yang bertujuan melayani kepentingan umum dibidang produksi, distribusi, konsumsi sekaligus dimungkinkan untuk memupuk kepentingan dalam batas yang wajar.
- c) Perseroan yaitu Perusahaan pemerintah yang bertujuan memupuk keuntungan atau memperoleh surplus dari hasil pelayanan dan pembinaan organisasi berdasar prinsip manajemen perusahaan yang menguntungkan.

BAB III

Gambaran Umum Kota Surakarta

A. Aspek Geografis

1. Letak

Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan “**Kota Solo**” secara umum merupakan dataran rendah dan berada antara pertemuan kali / sungai-sungai Pepe, Jenes dengan Bengawan Solo, yang mempunyai ketinggian ± 92 m dari permukaan air laut dan terletak antara :

110°45’15” – 110°45’35” Bujur Timur

7°36’00” – 7°56’00” Lintang Selatan

Kota Surakarta dibatasi :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan
Kabupaten Boyolali.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan
Kabupaten Karanganyar.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

2. Ketinggian

Wilayah Kota Surakarta tersebar pada ketinggian kurang lebih 92 meter dari permukaan air laut, yang berarti bahwa lebih rendah atau hampir sama tingginya dengan sungai Bengawan Solo.

3. Iklim

- a. Suhu udara maksimum : 27,6 °C
- b. Suhu udara minimum : 25,6 °C
- c. Rata-rata tekanan udara : 1009,4 mbs
- d. Kelembaban udara : 75%
- e. Kecepatan angin : 4 knot
- f. Arah angin : 2400

4. Keadaan Tanah

Kota Surakarta secara umum keadaannya datar, hanya bagian utara dan timur agak bergelombang dengan ketinggian kurang lebih 92 meter diatas permukaan air laut. Sebagian jenis tanahnya adalah tanah liat berpasir termasuk regosal kelabu dan aluvial. Di wilayah bagian utara tanah gromosal serta wilayah bagian timur laut tanah litosal mediteranian.

5. Dasar Hukum

Sebutan / nama Kota Surakarta baru dimulai adanya Undang-undang No 18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965 dan ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan bila kita lihat sejak lahir mengalami tujuh kali periode / perubahan sebutan nama tersebut.

a. Periode Pemerintahan Daerah Kota Surakarta

Dimulai pada tanggal 16 Juni 1946 (Hari Jadi) sampai dengan berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 1947 tanggal 5 Juni 1947.

b. Periode Pemerintahan Kota Besar Surakarta

Dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948 sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tanggal 18 Januari 1957.

c. Periode Pemerintah Daerah Kotapraja Surakarta

Dimulai dengan berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1957 sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965.

d. Periode Pemerintah Kotamadia Surakarta

Dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965 sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1974.

e. Periode Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Dimulai dengan berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1974 sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tanggal 4 Mei 1999.

f. Periode Pemerintah Kota Surakarta

Dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sampai dengan sekarang.

B. Aspek Demografis

1. Wilayah Surakarta

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan yaitu Laweyan, Serengan, Pasar

TABEL 3.1
BANYAKNYA KECAMATAN,LUAS WILAYAH,RW,DAN RT DI
SURAKARTA
TAHUN 2002

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kelurahan	Rw	Rt
Laweyan	8,64	11	105	452
Serengan	3,19	7	75	332
Pasar Kliwon	4,82	9	100	424
Jebres	12,58	11	145	605
Banjarsari	14,81	13	167	832
Jumlah	44,04	51	592	2.645
Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kelurahan	Rw	Rt
Laweyan	8,64	11	105	452
Serengan	3,19	7	75	332
Pasar Kliwon	4,82	9	100	424
Jebres	12,58	11	145	605
Banjarsari	14,81	13	167	832
Jumlah	44,04	51	592	2.645

Sumber : BPS Kota Surakarta 2002

kliwon, Jebres, dan Banjarsari. Dari setiap kecamatan di Surakarta total kelurahan sebanyak 51 kelurahan. Dengan total Rw berjumlah 592, Rt berjumlah 2.645 pada tahun 2002.

2. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga

Menurut data yang tercatat pada kantor Badan Pusat Statistik kota Surakarta pada tahun 2002, jumlah penduduk kota Surakarta sebanyak 554.630 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 3.2
JUMLAH PENDUDUK,SEX RATIO,DAN KEPADATAN
PERKECAMATAN
TAHUN 2002

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sex Ratio	Tingkat kepadatan
Laweyan	107.622	98	12.459
Serengan	61.945	96	19.394
Pasar Kliwon	85.593	96	17.776
Jebres	136.762	95	10.870
Banjarsari	162.708	98	10.986
Jumlah	554.630	96	12.594

Sumber : BPS Kota Surakarta 2002

3. Pendidikan dan Tenaga Kerja

Untuk dapat mengetahui tingkat pendidikan dari penduduk Kota Surakarta, kita dapat melihatnya dalam tabel berikut :

TABEL 3.3
BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

Tahun	Tamat Akademi / PT	Tamat SLTA	Tamat SLTP	Tamat SD
1999	24.809	87.979	96.908	110.535
2000	25.481	89.376	96.267	107.525
2001	26.829	90.646	98.017	105.686
2002	29.770	93.070	98.107	106.095

Sumber : BPS Kota Surakarta 2002

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2002 mayoritas penduduk atau sebesar 106.095 jiwa masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu hanya menyelesaikan pendidikan dasar (SD), dan penduduk yang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi setingkat akademi maupun perguruan tinggi masih relatif sedikit yaitu sebanyak 29.770 jiwa. Tetapi melihat adanya kenaikan setiap tahunnya dalam menyelesaikan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa masyarakat kota Surakarta sudah mengerti akan pentingnya pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan dalam

mencari pekerjaan, dimana ketentuan minimal dalam mencari kerja sekarang adalah lulusan SLTA.

Menurut jenis usaha / jenis industri yang ada di Surakarta, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2002 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 45.814 tenaga kerja. Jenis usaha di Surakarta terdiri dari jenis usaha besar, menengah, kecil dan non formal. Sedangkan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah di jenis industri kecil dan menengah. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.4
JUMLAH UNIT USAHA DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
KOTA SURAKARTA
2001-2002

Jenis Industri	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
	2001	2002	2001	2002
Besar	2	2	872	872
Menengah	67	69	12.940	12.953
Kecil	843	866	20.043	20.893
Non Formal	3613	3723	10.803	11.096
Jumlah	4525	4660	44.658	45.814

Sumber : BPS, Kota Surakarta 2002

C. Keadaan Perekonomian Kota Surakarta

Pada tahun 2002 kondisi ekonomi Kota Surakarta telah mengalami recovery dibanding tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2002 telah mengalami peningkatan yang cukup melegakan 5,32 persen. Pada tahun-tahun sebelumnya setelah krisis tahun 1998, pertumbuhan ekonomi masih sekitar 4 persen.

Kota Surakarta sebagai daerah yang tidak memiliki potensi sumberdaya alam, tentunya akan sangat tergantung kepada masukan produk SDA dari luar wilayah Surakarta, khususnya dari wilayah karesidenan. Akan tetapi, sebagai daerah yang

memiliki fungsi layanan jasa-jasa, ternyata ketergantungan tidak searah. Wilayah sekitar Surakarta ternyata juga sangat menggantungkan layanan jasa yang ada di Surakarta untuk menjalankan roda ekonominya.

Salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan dan harga berlaku. Tahun 2002 atau empat tahun setelah krisis, PDRB Surakarta sudah hampir mencapai angka PDRB sebelum krisis. Pada tahun 1997, PDRB Surakarta telah mencapai 1.432.582,37 juta rupiah. Tetapi dengan terjadinya krisis, level kinerja ini baru dapat didekati di tahun 2002 dengan nilai PDRB sebesar 1.425.961,17 juta rupiah pada harga konstan.

Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya ternyata peranan dari sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Surakarta masih paling dominan, baik pada harga berlaku maupun pada harga konstan-nya. Peranan sektor industri ini, di tahun 2002 mencapai 29,63 persen pada harga berlaku dan 24,88 pada harga konstan.

Sektor dominan berikutnya adalah perdagangan, hotel dan rumah makan, sebesar ; 23,43 persen pada harga berlaku dan 22,10 persen pada harga konstan-nya. Kemudian sektor jasa-jasa yang pada harga berlaku menyumbang sebesar ; 11,60 persen dan 14,83 persen pada harga konstan. Sedangkan sektor angkutan dan komunikasi menyumbang sebesar 10,60 persen pada harga berlaku dan 13,19 persen pada harga konstan.

Keempat sektor diatas, telah menyumbang pada PDRB lebih dari 70 persen. Meskipun demikian, untuk sektor industri ini seyogyanya lebih diarahkan pada kegiatan industri yang ramah lingkungan dengan limbah pencemar lingkungan yang sangat minimal.

Jika sektor tersebut dikelompokkan dalam tiga kelompok besar ; primer, sekunder, dan tersier, maka sektor tersier merupakan penyumbang terbesar PDRB, yaitu sebesar 56,53 persen pada harga berlaku dan 58,56 persen pada harga konstan. Pada tabel berikut ini menggambarkan perkembangan perekonomian kota Surakarta pada tahun 2002.

TABEL 3.5
KEADAAN EKONOMI SURAKARTA
2002

No	Komponen	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 44.938.084.099,00
2.	Pajak Reklame	Rp 1.402.712.288,00
3.	PDRB, sector (Jutaan Rupiah)	
	a. Pertanian	Rp 21.180,95
	b. Pertambangan	Rp 867,94
	c. Industri Pengolahan	Rp 355.007,84
	d. Listrik, gas, air bersih	Rp 28.238,19
	e. Perdagangan, hotel, restoran	Rp 315.334,68
	f. Pengangkutan dan Komunikasi	Rp 189.090,65
	g. Keuangan, Persewaan	Rp 119.562,81
4.	Banyaknya Wajib Pajak Badan (Perusahaan)	Rp 4660,00
5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur	Rp 554.630,00

Sumber : BPS Kota Surakarta

Perkembangan penduduk di tiap kecamatan di Kotamadya Surakarta menunjukkan peningkatan secara stabil. Di setiap kecamatan menunjukkan jumlah penduduk perempuan baik itu anak – anak maupun dewasa lebih besar dari jumlah penduduk pria anak-anak dan dewasa. Jumlah penduduk terbesar berada di kecamatan Banjarsari yaitu jumlah penduduk laki-laki sebesar 80.347 jiwa dan untuk jumlah penduduk perempuan sebesar 82.361 jiwa. Jumlah penduduk terkecil terdapat dikecamatan Serengan yaitu jumlah penduduk pria sebesar 30.390 dan untuk jumlah penduduk perempuan sebesar 31.555. Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi

penduduk menurut jenis kelamin pada tiap kecamatan di Kota Surakarta pada tahun 2002.

TABEL 3.6
BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, DEWASA dan
ANAK PERKECAMATAN KOTA SURAKARTA
2002

Kecamatan	Dewasa		Anak		Dewasa Dan Anak		
	Laki-Laki	Perem-Puan	Laki-laki	Perem-puan	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Laweyan	35.872	36.715	17.278	17.757	53.150	54.472	107.622
2. Serengan	17.999	19.172	12.391	12.383	30.390	31.555	61.945
3. Ps. Kliwon	31.041	32.271	10.916	11.365	41.957	43.636	85.593
4. Jebres	41.399	44.211	25.072	26.080	66.471	70.291	136.762
5. Banjarsari	49.466	50.770	30.881	31.591	80.347	82.361	162.708
Kota	175.777	183.139	96.538	99.176	272.315	382.315	554.630
Tahun 2001	176.465	183.598	95.426	97.991	271.891	281.689	553.580
Tahun 2000	174.948	182.574	95.156	97.573	270.104	280.147	550.251
Tahun 1999	173.635	181.464	94.540	96.830	268.175	278.294	546.469
Tahun 1998	170.948	179.429	94.993	97.462	265.941	276.891	542.832

Sumber : BPS Kota Surakarta

dalam jenis mata pencaharian baik itu sebagai pengusaha maupun sebagai buruh industri disusul dengan jenis pekerjaan sebagai buruh bangunan kemudian pedagang, dan jasa pengangkutan. Tabel di bawah ini menjelaskan banyaknya penduduk menurut mata pencaharian di tiap-tiap kecamatan. Gambaran jenis usaha masyarakat pada setiap kecamatan di Kota Surakarta menunjukkan bahwa sektor industri merupakan sektor yang terbanyak menampung masyarakat di Kota Surakarta pada tahun 2002.

TABEL 3.7
BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
PERKECAMATAN KOTA SURAKARTA
2002

Kecamatan	Petani Sendiri	Buruh Tani	Nelayan	Pengusaha	Buruh Industri	Buruh Bangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1. Laweyan	43	145	0	402	20.893	16.195
2. Serengan	0	0	0	1.495	6.554	6.056
3. Ps. Kliwon	0	0	0	1.963	10.051	6.879
4. Jebres	86	0	0	759	18.968	16.736
5. Banjarsari	643	608		4.931	16.940	19.104
Kota	772	753	0	9.550	73.406	64.970
Tahun 2001	737	831	-	9.232	69.546	59.613
Tahun 2000	350	394	-	6.679	69.571	60.764
Tahun 1999	1.048	963	-	9.419	72.043	61.976
Tahun 1998	1.047	889	-	9.488	71.867	60.829

Sumber : BPS Kota Surakarta

LANJUTAN TABEL 3.7

Kecamatan	Pedagang	Pengan g-kutan	PNS/ ABRI	Pensiuna n	Lain - lain	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Laweyan	5.598	2.098	5.577	4.875	27.510	83.336
2. Serengan	3.161	3.040	1.547	1.368	21.351	44.572
3. Ps. Kliwon	7.459	3.862	2.943	2.032	22.676	57.865
4. Jebres	3.184	927	6.845	5.090	45.836	98.431
5. Banjarsari	11.271	8.608	9.861	9.492	36.633	192.404
Kota	30.673	18.535	26.773	22.857	154.006	476.608
Tahun 2001	24.736	17.301	21.647	18.769	156.218	454.262
Tahun 2000	22.079	15.858	24.654	16.235	164.548	381.132
Tahun 1999	1.048	863	-	9.419	72.043	61.976
Tahun 1998	1.047	889	-	9.488	71.867	60.829

Sumber : BPS Kota Surakarta

Produk Domestik Bruto di Kota Surakarta menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 1993 tahun 2001 – 2002 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp. 73.078 ribu Rupiah. Peningkatan terbesar dicapai oleh sector industri pengolahan yaitu dari Rp 338.635,36 ribu rupiah pada tahun 2001

menjadi Rp 355.007,84 pada tahun 2002. sedangkan peningkatan terkecil terdapat pada sector pertambangan dan penggalian yaitu dari Rp 806,52 pada tahun 2001 menjadi 867,94 pada tahun 2002

TABEL 3.8

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2001-2002)**

Lapangan Usaha	2001	2002
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	19.598,58	21.180,95
1.1 Tanaman Bahan Makanan	2.126,04	2.276,47
1.2 Tanaman Perkebunan	109,31	114,28
1.3 Peternakan	17.353,13	18.778,55
1.4 Perikanan	10,10	11,64
2. Pertambangan dan Penggalian	806,52	867,94
2.1 Penggalian	806,52	867,94
3. Industri Pengolahan	338.635,36	355.007,84
3.1 Industri Besar dan Sedang	293.411,34	307.741,98
3.2 Industri Kecil	27.193,15	28.823,93
3.3 Industri Rumah Tangga	18.030,87	18.441,93
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	27.066,030	28.238,19
4.1 Listrik	22.259,47	23.277,64
4.2 Air Bersih	4.806,83	4.960,55
5. Bangunan	177.242,77	186.005,99
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	302.449,10	315.334,68
6.1 Perdagangan	263.462,88	275.276,46
6.2 Hotel	14.719,56	15.218,60
6.3 Restoran	24.266,66	24.839,63
7. Pengangkutan dan Komunikasi	179.683,77	189.090,65
7.1 Pengangkutan	144.814,87	151.846,31
7.2 Komunikasi dan Jasa Telekomunikasi	34.868,90	36.244,34
Lapangan Usaha	2001	2002
(1)	(2)	(3)
1. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	114.816,05	119.562,81
1.1 Bank		
1.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Jasa Penunjang	53.729,19	57.490,23
1.3 Sewa Bangunan	30.096,93	30.532,99
1.4 Jasa Perusahaan	28.953,94	29.495,87
	2.035,99	2.043,72
2. Jasa-Jasa	193.584,19	211.672,12
2.1 Pemerintahan Umum dan Pertahanan	137.731,84	156.934,57
2.2 Swasta	55.852,35	54.737,55
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.353.882,64	1.426.961,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 2002.

Sedangkan berdasarkan persentase sumbangan yang diberikan masing-masing sector terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kota Surakarta tahun 2001 – 2002 atas dasar harga konstan 1993 menunjukkan bahwa sector industri pengolahan masih sebagai penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta sebesar 25,01 persen pada tahun 2001 dan turun menjadi 24,88 persen pada tahun 2003, diurutan kedua adalah sector perdagangan hotel dan restoran yang menyumbang sebesar 22,34 persen pada tahun 2001 dan menurun menjadi 22,10 persen pada tahun 2002. sector yang paling kecil peranan terhadap Produk Domestik Regional Bruto kota Surakarta adalah sector pertambangan dan penggalian yang hanya menyumbangkan 0,06 persen terhadap PDRB Kota Surakarta baik pada tahun 2001 maupun tahun 2002. pada tabel berikut ini menjelaskan besarnya sumbangan yang diberikan masing-masing sector terhadap PDRB kota Surakarta tahun 2001 – 2002.

Jumlah wajib pajak badan yang terdapat di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2001 jumlah wajib pajak badan untuk industri besar dan menengah terdapat 65 untuk perusahaan besar dan 4085 untuk perusahaan kecil dan mengalami peningkatan menjadi 69 untuk perusahaan besar dan 4456 untuk perusahaan kecil. Pada tahun 2002 sudah terdapat 71 wajib badan dalam kategori perusahaan besar dan menengah dan 4589 untuk perusahaan kecil. Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah wajib pajak badan mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 di Kota Surakarta.

TABEL 3.10
BANYAKNYA PERUSAHAAN (BADAN)
MENURUT KELOMPOK USAHA (2000-2002)

Tahun	Cabang Industri	Perusahaan
2000	- Industri Besar/ Menengah	65
	- Industri Kecil	4085
2001	- Industri Besar/ Menengah	69
	- Industri Kecil	4456
2002	- Industri Besar/ Menengah	71
	- Industri Kecil	4589

Sumber : BPS Surakarta 2002

Sedangkan setiap tahunnya pendapatan dari sector pajak reklame berhasil memenuhi target yang ditetapkan bahkan dapat melampaui target semula setiap tahunnya. Lonjakan terbesar tercapai pada tahun anggaran 1999/2000 dimana pendapatan dari sector pajak reklame berhasil melampaui target semula sebesar Rp 47.153.000. tabel berikut menunjukkan perkembangan pajak reklame mulai tahun 1993/1994 sampai tahun 2002 di Kota Surakarta.

TABEL 3.11
TARGET DAN REALISASI PAJAK REKLAME
1993/1994-2002

Tahun	Target	Realisasi
1993/1994	210.000.000	210.788.495
1994/1995	230.000.000	230.123.944
1995/1996	265.000.000	265.362.595
1996/1997	260.000.000	272.548.975
1997/1998	360.000.000	369.936.988
1998/1999	290.000.000	323.120.978
1999/2000	365.000.000	412.153.974,50
2000	569.000.000	569.423.035
2001	958.667.000	967.323.153
2002	1.400.000.000	1.402.712.288

Sumber : Pemerintah Kota Surakarta 2002

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskripsi Variabel

Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan deskripsi dari masing-masing variabel yang diambil.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri dengan memberdayakan potensi daerah yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan dari Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surakarta Tahun 1993 - 2002

Tahun	Pajak Daerah	Restribusi Daerah	Bagian Laba BUMD	Penerimaan Dinas	Penerimaan Lain	Total PAD
1993/1994	3.857.497.946	6.870.151.909	164.092.081	157.793.001	168.045.487	13.880.721.577
1994/1995	4.834.738.089	7.731.267.166	235.898.259	164.727.770	210.208.385	17.947.751.955
1995/1996	5.881.655.561	8.982.760.738	309.582.980	142.047.550	286.659.291	21.221.003.450
1996/1997	6.473.586.402	9.672.311.720	418.753.059	155.259.800	446.269.603	24.584.156.052
1997/1998	7.535.326.360	10.351.221.990	514.200.999	154.185.675	379.416.337	26.491.058.768
1998/1999	7.903.412.099	8.078.604.279	353.451.061	-	1.164.068.285	25.151.011.224
1999/2000	9.154.634.854	9.558.255.723	252.772.913	-	922.405.621	29.025.242.527
2000	9.612.536.662	9.929.961.832	285.425.000	-	2.085.903.985	33.122.842.179
2001	15.880.303.712	16.723.167.571	388.922.000	-	2.648.070.350	63.200.017.413
2002	20.943.450.996	20.039.596.865	466.364.400	-	3.488.671.838	81.072.260.618

Sumber : Dipenda Kota Surakarta Tahun 2003-2004

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa sektor yang menyumbang PAD paling besar adalah berasal dari penerimaan restribusi daerah yang melebihi penerimaan lainnya di Kota Surakarta.

Pada tahun anggaran 1993/1994 – 1997/1998 penerimaan PAD berasal dari lima pos penerimaan yaitu pajak daerah, restribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dari dinas dan penerimaan lain-lain. Namun mulai tahun anggaran

1999/2000 pos penerimaan dari dinas tidak diberlakukan lagi, sehingga sumber PAD mulai tahun anggaran tersebut hanya berasal dari penerimaan pajak daerah, restribusi daerah, laba BUMD, dan penerimaan lain-lain.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Surakarta berjumlah 527.767 jiwa pada tahun 1993 dan menjadi 554.630 jiwa pada tahun 2002. pertumbuhan penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2895 jiwa per tahun atau meningkat sebesar 0,5499 persen per tahunnya. Tabel 4.2 berikut ini akan menyajikan perkembangan penduduk di Kota Surakarta mulai tahun 1993 sampai tahun 2002.

Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 1987 – 2003

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	Persentase
1993	527.767		
1994	531.377	3610	0.6793
1995	533.628	2251	0.4218
1996	536.571	2943	0.5484
1997	539.387	2816	0.5220
1998	542.832	3445	0.6346
1999	546.469	3637	0.6655
2000	550.251	3782	0.6873
2001	553.580	3329	0.6013
2002	554.630	1050	0.1893

Sumber : Pemkot Surakarta 2003

3. PDRB

PDRB di Kota Surakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sumber pendapatan asli daerah yang disumbangkan dari PDRB ini pada tahun 1993 mampu menyumbang sebesar Rp 1.067.560,66 dan pada tahun 2002 telah mencapai angka sebesar Rp 1.425.961,17. Tabel 4.3 berikut ini akan

menjelaskan gambaran tingkat PDRB di Kota Surakarta mulai dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2002.

Tabel 4.3 Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Tahun 1987 - 2003

Tahun	PDRB	Pertumbuhan (%)
1993	1.067.560	-
1994	1.158.730	7.86
1995	1.258.960	7.96
1996	1.374.559	8.40
1997	1.432.582	4.05
1998	1.233.018	-17.13
1999	1.250.807	2.22
2000	1.302.715	3.98
2001	1.353.882	3.77
2002	1.425.961	5.05

Sumber : Dipenda Kota Surakarta Tahun 2003-2004

4. Pajak Reklame

Penghasilan pajak yang diperoleh dari sektor pajak reklame di Kota Surakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1993 jumlah pajak reklame yang dapat dikumpulkan sebesar Rp 210.788.495 dan pada tahun 2002 telah mencapai angka sebesar Rp 1.804.690.293. berikut ini akan di sajikan Tabel 4.4 tentang perkembangan pajak reklame di Kota Surakarta.

Tabel 4.4 Pertumbuhan Pajak Reklame di Kota Surakarta

Tahun	Pajak Reklame	Persentase
1993	210.788.495	-
1994	230.123.944	8.40
1995	265.362.595	13.27
1996	272.548.975	2.63
1997	369.936.988	26.32
1998	323.120.978	-14.48
1999	412.153.974	21.60
2000	569.423.035	27.61
2001	967.325.153	41.13
2002	1.402.712.288	31.02

Sumber : Pemkot Kota Surakarta 2003

5. Jumlah Perusahaan

Jumlah wajib pajak badan adalah jumlah badan atau perusahaan yang berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Di kota Surakarta terdapat 3265 perusahaan yang termasuk dalam jumlah wajib pajak badan dan meningkat pada tahun 2002 menjadi 4660 wajib pajak badan, hal ini tentu saja akan menambah pendapatan asli daerah dari sektor wajib pajak badan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dari wajib pajak badan di Kota Surakarta dari tahun 1993 sampai tahun 2002 pada tabel 4.5 akan diterangkan secara lebih terperinci.

**Tabel 4.5 Jumlah Perusahaan/ Badan di Kota Surakarta
Tahun 1993 – 2002**

Tahun	Jumlah Perusahaan	Persentase
1993	3265	-
1994	3420	4.53
1995	3645	6.17
1996	3760	3.05
1997	3910	3.83
1998	3740	-4.54
1999	3990	6.26
2000	4150	3.85
2001	4525	8.28
2002	4660	2.89

Sumber : Pemkot Kota Surakarta 2003

Analisis Data

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dilakukan analisis dari data yang telah diperoleh yaitu dari data time series dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2002. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama dengan melakukan perhitungan

dengan cara membandingkan antara pertumbuhan pajak reklame dengan pertumbuhan Pajak Daerah untuk mengetahui pertumbuhan pajak reklame terhadap Pajak Daerah di kota Surakarta, dan membandingkan antara jumlah pajak reklame dengan rata-rata pajak secara keseluruhan untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap pajak secara keseluruhan. Analisis yang kedua adalah menggunakan analisis trend dan ketiga dengan analisis regresi berganda dengan variabel dependen Pajak reklame di Kota Surakarta dan variabel independen yaitu tingkat PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah wajib pajak badan di Kota Surakarta.

1. Analisis Matriks Kontribusi

a) Mencari rata-rata pajak daerah untuk menghitung Kontribusi Pajak Reklame:

Tahun 1993 = Rp 321.458.162,2

Tahun 1994 = Rp 386.228.174

Tahun 1995 = Rp 490.137.963,4

Tahun 1996 = Rp 539.465.533,5

Tahun 1997 = Rp 627.943.863,3

Tahun 1998 = Rp 1.580.682.419

Tahun 1999 = Rp 1.830.926.970

Tahun 2000 = Rp 1.922.507.332

Tahun 2001 = Rp 3.176.060.742,4

Tahun 2002 = Rp 4.188.690.199,2

b) Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Rata-rata Pajak Daerah:

$$\text{Tahun 1993} = \frac{210.788.495}{3.857.497.945} = 0,055$$

$$\text{Tahun 1994} = \frac{230.123.944}{4.834.738.089} = 0,047$$

$$\text{Tahun 1995} = \frac{265.362.595}{5.881.655.561} = 0,045$$

$$\text{Tahun 1996} = \frac{272.548.975}{6.473.586.402} = 0,042$$

$$\text{Tahun 1997} = \frac{369.936.988}{7.535.326.360} = 0,050$$

$$\text{Tahun 1998} = \frac{323.120.978}{7.903.412.099} = 0,040$$

$$\text{Tahun 1999} = \frac{412.153.974}{9.154.634.854} = 0,045$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{569.423.035}{9.612.536.662} = 0,060$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{967.325.153}{15.880.303.712} = 0,060$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{1.402.712.288}{20.943.450.996} = 0,066$$

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata kontribusi} &= \frac{0,5118}{10} \\ &= 0,05118 \end{aligned}$$

c) Pertumbuhan pajak daerah :

$$\text{Tahun 1994} = \frac{64.770.011,9}{321.458.162,1} = 0,2014$$

$$\text{Tahun 1995} = \frac{103.909.789,4}{386.228.174} = 0,2690$$

$$\text{Tahun 1996} = \frac{49.327.570,1}{490.137.963,4} = 0,1006$$

$$\text{Tahun 1997} = \frac{88.478.329,8}{539.465.533,5} = 0,1640$$

$$\text{Tahun 1998} = \frac{952.738.556}{627.943.863,3} = 1,51723$$

$$\text{Tahun 1999} = \frac{250.244.551}{1.580.682.419} = 0,15831$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{91.580.362}{1.830.926.970} = 0,0500$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{1.253.553.410,4}{1.922.503.332} = 0,6520$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{1.012.629.456,8}{3.176.060.742,4} = 0,31883$$

d) Pertumbuhan Pajak Reklame :

$$\text{Tahun 1994} = \frac{19.355.449}{210.788.495} = 0,092$$

$$\text{Tahun 1995} = \frac{35.238.651}{230.123.944} = 0,153$$

$$\text{Tahun 1996} = \frac{7.186.380}{265.362.595} = 0,027$$

$$\text{Tahun 1997} = \frac{97.388.013}{272.548.975} = 0,360$$

$$\text{Tahun 1998} = \frac{-46.816.010}{369.936.988} = -0,126$$

$$\text{Tahun 1999} = \frac{89.032.996}{323.120.978} = 0,275$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{157.269.060}{412.153.974} = 0,381$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{397.902.118}{569.423.035} = 0,699$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{435.387.135}{967.325.153} = 0,450$$

e) Pertumbuhan pajak reklame terhadap pertumbuhan pajak daerah :

$$\text{Tahun 1994} = \frac{0,092}{0,2014} = 0,4568$$

$$\text{Tahun 1995} = \frac{0,153}{0,2690} = 0,5687$$

$$\text{Tahun 1996} = \frac{0,027}{0,100} = 0,2700$$

$$\text{Tahun 1997} = \frac{0,360}{0,1640} = 2,1951$$

$$\text{Tahun 1998} = \frac{-0,126}{1,5172} = -0,0830$$

$$\text{Tahun 1999} = \frac{0,275}{0,1583} = 1,7370$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{0,381}{0,050} = 7,6200$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{0,699}{0,6520} = 1,0720$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{0,450}{0,3188} = 1,4114$$

$$\text{Rata-rata Kontribusi Pertumbuhan Pajak reklame terhadap Pajak Daerah} = \frac{15,248}{9} = 1,694$$

Tabel 4.6 Ratio Pertumbuhan Pajak reklame dengan Pajak Daerah di Kota Surakarta Tahun 1993 – 2002

Tahun	Pertumbuhan Pajak reklame
1994	0,363
1995	0,708
1996	0,270
1997	2,195
1998	-2,625
1999	1,740
2000	7,620
2001	1,072
2002	1,411
Rata-rata	1,417

Sumber : Hasil perhitungan

Tabel 4.7 Ratio Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 1993 - 2002

Tahun	Pertumbuhan Pajak reklame
1993	0,674
1994	0,595
1995	0,541
1996	0,505
1997	0,589
1998	0,204
1999	0,225
2000	0,296
2001	0,305
2002	0,335
Rata-rata	0,427

Sumber : Hasil Perhitungan

Sehingga dari dua perhitungan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Status Kriteria Kinerja Pajak Reklame Kota Surakarta
Tahun 1993-2002

Tahun	Kinerja Pajak Reklame
1993	Terbelakang
1994	Terbelakang
1995	Terbelakang
1996	Berkembang
1997	Terbelakang
1998	Berkembang
1999	Berkembang
2000	Berkembang
2001	Berkembang
2002	Berkembang
Rata-rata	Berkembang

Dari hasil perhitungan pertumbuhan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusi pajak reklame terhadap pajak keseluruhan dapat dikatakan bahwa pajak reklame mengalami perkembangan (dalam tahap berkembang) selama 10 tahun. Karena rata-rata pertumbuhan pajak reklame terhadap Pajak Daerah > 1 dan rata-rata kontribusi pajak reklame < 1 maka pendapatan pemerintah daerah dari sektor pajak reklame mengalami perkembangan (dalam tahap berkembang).

2. Model analisis trend yang akan digunakan adalah :

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y : Jumlah penerimaan dari pajak reklame (Rupiah)

a : Konstanta

b : Besar perubahan variabel Y yang terjadi pada setiap perubahan satu unit variabel x.

X : Tahun

Tabel 4.9 Trend Perkembangan Pajak Reklame di Kota Surakarta Tahun 1993 – 2002

Tahun	X	y	Xy	x ²
1994	-4	230123944	-920495776	16
1995	-3	265362595	-796087785	9
1996	-2	272548975	-545097950	4
1997	-1	369936988	-369936988	1
1998	0	323120978	0	0
1999	1	412153974	412153974	1
2000	2	569423035	1138846070	4
2001	3	967325153	2901975459	9
2002	4	1402712288	5610849152	16
Jumlah		4812707930	7432206156	60

Sumber : Perhitungan Data Trend, 2004.

Tabel 4.10 Regresi tunggal antara variabel X dan Y

Keterangan	Koefisien	Standar error	T hitung	Probabilitas
Konstanta	$5,35 \times 10^8$	73694976	7,256198	0,0002
Pajak Reklame	$1,24 \times 10^8$	28541942	4,339933	0,0034

Sumber : Printout Komputer, 2004

Dari hasil Regresi tunggal diatas dengan nilai probabilitas masing-masing koefisien X dan Y lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 maka memberikan pengaruh yang signifikan antara koefisien tersebut dan persamaan tersebut adalah benar

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat persamaan trend linear, yaitu :

$$Y = 5,35 \times 10^8 + 1,24 \times 10^8 X$$

Berdasarkan persamaan linier di atas maka dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan pertumbuhan PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah Perusahaan/ badan terhadap pendapatan dari pajak reklame di Kota Surakarta menunjukkan kearah positif, dengan ditunjukkan besaran intersep (b) sebesar 1,24

$\times 10^8$ dan perkembangan ke depan adalah meningkat karena koefisien b lebih besar dari 0.

Berikut ini adalah Prospek Pendapatan dari sektor Pajak Reklame untuk beberapa Tahun kedepan:

Tabel 4.11. Trend Pajak Reklame 11 Tahun Mendatang

Tahun	X	Pajak Reklame
2003	5	1155000000
2004	6	1279000000
2005	7	1403000000
2006	8	1527000000
2007	9	1651000000
2008	10	1775000000
2009	11	1899000000

Sumber : Printout Komputer, 2004

3. Regresi linear berganda yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada persamaan di bawah ini.

$$\text{Pajak reklame} = a + b_1 \text{PDRB} + b_2 \text{Penduduk} + b_3 \text{Jumlah perusahaan} + e_i$$

Keterangan :

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Pajak reklame = Pajak yang diperoleh dari reklame (Rupiah)

Penduduk = Jumlah Penduduk (Jiwa)

Jumlah Perusahaan = Jumlah Perusahaan wajib pajak badan di kota Surakarta

e_i = Error Term

Berdasarkan data yang diperoleh kemudian dilakukan perhitungan data dengan menggunakan program E-views. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.12 Regresi Lienar Berganda dengan Variabel Dependen Pajak Reklame

Variabel Dependen : Pajak Reklame				
Variabel	Koefisien	Standar Error	t-Hitung	Tingkat Signifikansi
Konstanta	1.82 E + 10	8.11E+09	2.248277	0.0656
PDRB	-1615.455	616.5774	-2.620036	0.0036
Penduduk	43293.77	17175.76	2.520632	0.0396
Jmlh Perush	1997946	432741	4.616956	0.0036
R ² : 0.89888				
F Statistik : 27.67038				
DW Statistik : 2.369894				

Sumber : Print Out Komputer 2004

Untuk Mengetahui adanya kesesuai tanda parameter estimasi dengan teori yang menerangkan, hasil estimasi fungsi diatas perlu diuji dengan uji statistik dan uji asumsi klasik.

a. Uji Statistik

1. Uji t (Uji Secara Individu)

Uji t Adalah pengujian variabel indepeden secara individu yang bertujuan untuk melihat apakah variabel independen tersebut signifikan atau tidak dalam mempengaruhi variabel dependen. Jika besarnya t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hit} > t_{tabel}$) atau $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ ($-t_{hit} < -t_{tabel}$), maka variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen secara individu. Cara lain yaitu dengan melihat tingkat signifikansi. Jika nilai signifikansinya $< 0,1$ berarti variabel tersebut signifikan pada taraf signifikansi 10%, jika nilai tersebut signifikansinya $<$

0,05 maka variabel tersebut signifikan pada taraf signifikansi 5% dan bila variabel tersebut mempunyai signifikansi $< 0,01$ maka variabel tersebut signifikan pada taraf signifikansi 1%.

a) Variabel PDRB

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, diperoleh bahwa nilai t hitung untuk variabel tingkat PDRB masyarakat di Kota Surakarta sebesar $-2,620036$ yang kurang dari $-t$ tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 10$ yang bernilai $-2,2281$. Bila dilihat dari probabilitasnya yang mempunyai nilai $0,0396$ yang lebih kecil dari taraf signifikansinya sebesar $0,05$ maka dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat PDRB di Kota Surakarta memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak reklame di Kota Surakarta.

b) Variabel Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, diperoleh bahwa nilai t hitung untuk variabel jumlah penduduk Kota Surakarta sebesar $2,520632$ yang lebih besar dari t tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 10$ yang bernilai $2,2281$. Bila dilihat dari probabilitasnya yang mempunyai nilai $0,0452$ yang lebih kecil dari taraf signifikansinya sebesar $0,05$ maka dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk di Kota Surakarta memang

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan dari pajak reklame di Kota Surakarta.

c) Variabel Jumlah perusahaan

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, diperoleh bahwa nilai t hitung untuk variabel Jumlah perusahaan di Kota Surakarta sebesar 4,616956 yang lebih besar dari t tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 10$ yang bernilai 2,2281. Bila dilihat dari probabilitasnya yang mempunyai nilai 0,0036 yang lebih kecil dari taraf signifikansinya sebesar 0,05 maka dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Perusahaan di Kota Surakarta memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan Pajak reklame di Kota Surakarta.

2. Uji F (Uji Secara Serempak)

Besarnya F -statistik menunjukkan signifikan atau tidaknya variabel-variabel tersebut dalam mempengaruhi variabel tak bebas secara bersama-sama. Jika F statistik $> F$ tabel, berarti secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tak bebas atau signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dari F tabel yang diperoleh pada $\alpha = 5\%$, dan $(n-k) = 9$ serta $k-1 = 2$ diperoleh F tabel sebesar 4,26. bila di bandingkan dengan nilai F hitung yaitu 27,67 yang jauh lebih besar dari F tabel maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas dalam persamaan di atas mempengaruhi variabel Pajak reklame secara signifikan. Tingkat signifikansi dari nilai F statistik dapat juga dilihat dari probabilitas F statistiknya. Besarnya probabilitas F statistik dalam model persamaan ini adalah 0,00653 maka dapat dikatakan bahwa secara statistik semua koefisien regresi tersebut signifikan, bahkan sampai pada tingkat signifikansi 1%. Ini berarti bahwa variabel tingkat PDRB, Jumlah perusahaan,

dan Jumlah penduduk secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel tingkat pendapatan pajak reklame.

3. Uji R^2 (Goodness of Fit Test)

Besarnya R^2 menunjukkan besarnya pengaruh yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) terhadap variabel tak bebas (dependen). Besarnya R^2 adalah 0,8988, artinya bahwa sekitar 89,88% variasi tingkat Pajak reklame di Surakarta dapat dijelaskan oleh variasi variabel tingkat PDRB, Jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk sedangkan sisanya sebesar 10.12% dijelaskan oleh variasi variabel lain di luar model. Hasil estimasi model tingkat pajak reklame Surakarta menunjukkan nilai R^2 yang tergolong berada pada tingkat yang tinggi sehingga variabel-variabel tersebut memang dapat menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi pada tingkat pendapatan asli daerah di Kota Surakarta.

b. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil penelitian yang dimanifestasikan dalam persamaan regresi yang digunakan pada bab sebelumnya perlu dikaji apakah hasil tersebut dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dengan kata lain, apakah hasil tersebut dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dengan kata lain, apakah hasil-hasil regresi di atas memenuhi kaidah Best Linier Unbiased Estimator (BLUE), sehingga tidak ada gangguan serius terhadap asumsi klasik dalam metode kuadrat terkecil tunggal (OLS).

Dalam persamaan tunggal, asumsi yang perlu diperhatikan dan dikaji dari hasil regresi agar tidak menyimpang dari asumsi OLS adalah Multikolinieritas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi.

1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terdapat korelasi linier antara masing-masing variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas maka digunakan metode Klein yang dikemukakan oleh L.R. Klein (Gujarati, 1995 : 336). Metode ini membandingkan $r^2_{X_i, X_j}$ (korelasi antar masing-masing variabel independen) dengan $R^2_{y, X_i, X_j, \dots, X_n}$ (koefisien determinasi). Jika $R^2_{y, X_i, X_j, \dots, X_n} > r^2_{X_i, X_j}$ maka tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Hasil Correlation Matrix dengan menggunakan Metode Klein dari persamaan tingkat pajak reklame Kota Surakarta sebagai variabel tak bebasnya ditunjukkan oleh tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.13 Correlation Matrix Dengan Menggunakan Metode Klein

	Perush	PDRB	JP
Perush	1.0000	0.7577	0.9368
PDRB	0.7577	1.0000	0.6324
JP	0.9368	0.6324	1.0000

Sumber : Print Out Komputer 2004

Tabel 4.14 Uji Klein Untuk Mendeteksi Masalah Multikolinieritas

Variabel	$r_{x_i y_i}$	$r^2_{x_i y_i}$	$R^2_{y_{ixn}}$	Kesimpulan
Perush – PDRB	0.7577	0.5741	0.8988	Bebas Multikolinearitas
Perush – JP	0.9368	0.8775	0.8988	Bebas Multikolinearitas
PDRB – JP	0.6324	0.3999	0.8988	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Print Out Komputer 2004

Dari tabel 4.12 ditunjukkan bahwa untuk semua korelasi antar variabel bebas memiliki r^2 yang lebih kecil dari R^2 ($r^2 < R^2$). Hal ini memberi kesimpulan bahwa semua variabel bebas dalam memberi pengaruh, bebas dari masalah multikolinieritas.

2. Uji Heterokedastisitas

Pengujian untuk penyimpangan asumsi klasik yang kedua adalah untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana varian setiap unsur-unsur gangguan (disturbance term) yang dibatasi oleh nilai konstan yang sama dengan σ^2 . Dalam hal ini heteroskedastisitas akan muncul jika terjadi gangguan pada fungsi regresi yang mempunyai varian tidak sama, sehingga penaksir OLS tidak lagi efisien baik dalam sampel besar maupun kecil.

Seperti halnya dalam masalah multikolinieritas dan asumsi klasik lainnya, salah satu masalah yang sangat penting adalah bagaimana bisa mendeteksi atau melacak adanya-tidaknya masalah heterokedastisitas dalam suatu model empiris yang diestimasi. Seperti dalam kasus multikolinieritas, tidak ada satu aturan yang kuat dan ketat untuk mendeteksi heterokedastisitas. Walaupun demikian, para ahli ekonometrika menyarankan beberapa metode untuk dapat mendeteksi ada tidaknya masalah heterokedastisitas dalam model empiris, seperti menggunakan uji Park (1966), uji Glesjer (1969), uji White (1980), uji Breusch-Pagan Godfrey.

Pada penelitian ini uji yang dipakai adalah uji Park. Pada uji Park ide dasar dari uji ini yaitu anggaphlah akan meregresi model regresi berganda

semua variabel bebas dengan residual kuadrat dari hasil persamaan regresi sebelumnya. Kemudian dari hasil regresi tersebut akan diperoleh t hitung dan nilai probabilitasnya, jika $-t \text{ tabel} < \pm t \text{ hitung} < +t \text{ tabel}$ atau probabilitas $> \alpha_{0,05}$ maka variabel tersebut bebas dari masalah Heteroskedastisitas dan apabila sebaliknya maka variabel tersebut terkena masalah Heteroskedastisitas. Pada penelitian ini hasil dari Uji Park di atas akan diberikan pada tabel berikut :

Tabel 4.15 Uji Park untuk Mendeteksi Masalah Heteroskedastisitas
Variabel Dependen : RESIDU

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-Hitung	Tingkat Signifikan
C	6.68E+17	4.68E+17	1.4276	0.2033
PDRB	-6.81E+10	3.56E+10	-1.9148	0.1040
PDDK	1.50E+10	9.91E+11	1.5174	0.1800
PERUSH	6.23E+13	3.50E+13	1.7868	0.0984

Sumber : Hasil Print Out Komputer 2004

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari semua variabel melebihi nilai taraf signifikansi pada 5%, sehingga dalam model tersebut tidak ditemui masalah Heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Seperti halnya multikolinieritas dan heterokedastisitas, autokorelasi juga merupakan salah satu asumsi dari model regresi linier klasik. Autokorelasi itu sendiri dapat diartikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau dengan kata lain, yakni suatu kondisi yang menggambarkan korelasi berurutan antara unsur-

unsur gangguan (disturbance term) dalam serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel besar ataupun kecil. Salah satu cara menguji ada tidaknya autokorelasi adalah dengan percobaan d (Durbin Watson).

Langkah-langkah dalam melakukan uji Durbin Watson adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan regresi dengan metode OLS untuk mendapatkan nilai residual e_i serta nilai d .
2. Mencari nilai d_l dan d_u dengan $k = 3$ dan $n = 10$ diperoleh nilai d_l dan d_u

Jika hipotesis adalah bahwa tidak ada serial korelasi positif, maka jika:

- $d < d_l$: Menolak H_0
- $d > d_u$: Tidak Menolak H_0
- $d_l \leq d \leq d_u$: Pengujian tidak meyakinkan

Jika hipotesis nol adalah bahwa tidak ada serial korelasi negatif maka jika:

- $d > 4 - d_l$: Menolak H_0
- $d < 4 - d_u$: Tidak menolak H_0
- $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$: Pengujian tidak meyakinkan

Jika H_0 adalah dua ujung, yaitu bahwa tidak ada serial autokorelasi baik positif atau negatif, maka jika :

- $d < d_l$: Menolak H_0
- $d > 4 - d_l$: Menolak H_0
- $d_u < d < 4 - d_u$: Tidak Menolak H_0
- $d_l \leq d \leq d_u$ atau $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$: Pengujian tidak meyakinkan.

Dari tabel DW pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5 persen dengan $k =$

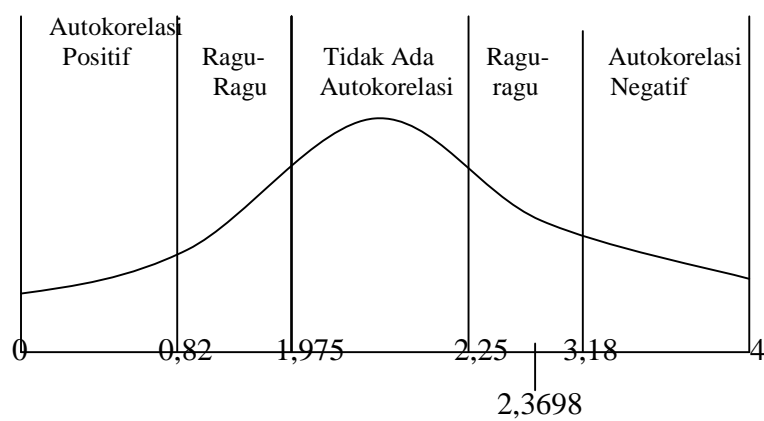
3 dan $n = 10$ diperoleh nilai :

$$d_l = 0,82$$

$$d_u = 1,75$$

$$4 - d_l = 3,18$$

$$4 - d_u = 2,25$$



Gambar 4.1.
Uji autokorelasi (DW – Test)

Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengujian autokorelasi menghasilkan nilai Durbin Watson stat 2,3698 yang berada di daerah ragu-ragu, yang berarti bahwa autokorelasi negatif tidak terjadi tetapi autokorelasi positif belum diketahui karena nilai Durbin Watsonnya berada di daerah ragu-ragu.

Interpretasi Hasil Analisis

1. Pengaruh Tingkat PDRB terhadap Pajak Reklame di Kota Surakarta

Dari hasil penelitian ini diperoleh koefisien regresi sebesar – 1615.455 yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan pada tingkat PDRB di Kota Surakarta sebesar Rp 1000,- maka akan menyebabkan perubahan pada tingkat pajak reklame sebesar Rp 1615.455 dan mengalami Penurunan, hasil regresi tersebut juga menunjukkan bahwa pengaruh tingkat PDRB terhadap tingkat Pajak Reklame di Kota Surakarta bernilai negatif. artinya meningkatnya Tingkat PDRB akan menurunkan pajak reklame di Kota Surakarta. Dari hasil uji signifikansi terbukti perubahan yang terjadi dalam tingkat PDRB akan mempunyai pengaruh yang signifikan pada perubahan yang terjadi dalam peningkatan pajak reklame di Kota Surakarta pada taraf signifikansi 0,05 atau 5 persen. akibat penurunan PDRB maka pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber pemasukan yang ada dari pos-pos pendapatan seperti pajak reklame sehingga pemerintah berusaha untuk menutup penurunan PDRB dengan sumber pendapatan yang salah satunya adalah melalui pajak reklame sehingga dengan menurunnya PDRB kota Surakarta akan meningkatkan Pajak reklame di Kota Surakarta.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Peningkatan Pajak Reklame Kota Surakarta.

Dari hasil regresi diperoleh koefisien regresi variabel jumlah penduduk sebesar 43293.77 yang berarti apabila terjadi kenaikan jumlah penduduk di Kota Surakarta sebesar 1000 jiwa maka akan menyebabkan peningkatan pada variabel pajak reklame sebesar Rp 43.293,77. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Pajak reklame di Kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi yang mana variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap peningkatan pajak reklame di Kota Surakarta pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%.

3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Pajak Reklame di Kota Surakarta

Dari hasil regresi diperoleh koefisien regresi untuk variabel Wajib Pajak Badan 1997946 yang berarti bila terjadi kenaikan pada jumlah perusahaan sebesar 1 akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat pajak reklame di Kota Surakarta sebesar Rp 1.997.946. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin banyak perusahaan yang dikenai wajib pajak akan mengakibatkan peningkatan pada pajak reklame karena perusahaan pada umumnya membutuhkan iklan dan promosi dalam memasarkan hasil produksinya agar dapat dikenal secara lebih luas di pasaran. Dan pengaruh yang di timbulkan dari variabel ini adalah signifikan dan penting pada taraf signifikansi 5%. Jumlah wajib pajak badan merupakan variabel yang paling besar kontribusinya di dalam peningkatan pajak reklame di Kota Surakarta karena peningkatan yang terjadi dari variabel ini pengaruhnya sangat besar terhadap peningkatan variabel pajak reklame di kota Surakarta. Sedangkan variabel lainnya peningkatannya masih lebih kecil bila di bandingkan dengan variabel wajib pajak badan.

DAFTAR PUSTAKA

Damodar Gujarati, Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga, 1998.

Davey, K. J. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta: UI Press, 1998.

Davos, Nick, et.al., Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, UI Press, 1989.

Soetrisno Ph, Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara, Cetakan 2, Yogyakarta, BPFE UGM, 1982.

Suparmoko, M. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE, 1987.

- Undang-undang Otonomi Daerah 1999. Jakarta: Citra Umbara, 2001.
- Djarwanto PS. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Yogyakarta: BPFE-UGM, 1987.
- Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Undang-undang Perpajakan 2000. Bandung: Citra Umbara, 2001
- Dinas Pendapatan Daerah 2002. Pemerintah Kota Surakarta, 2003.
- Wali Kota Surakarta. Lembaran Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Reklame. Surakarta: 2003.
- Surakarta Dalam Angka. 2000, 2001, 2002. Surakarta: 2000, 2001, 2002.
- Safri Nurmatu. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit, 2003.
- Nugroho Budiyono. Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan. Yogyakarta: YKPN, 1993.
- Suparmoko. Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE-UGM, 1980.
- Davey, K. J. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta: UI Press, 1998.
- Davos, Nick, et.al., Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, UI Press, 1989.
- Soetrisno Ph, Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara, Cetakan 2, Yogyakarta, BPFE UGM, 1982.
- Suparmoko, M. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Undang-undang Otonomi Daerah 1999. Jakarta: Citra Umbara, 2001.
- Djarwanto PS. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Yogyakarta: BPFE-UGM, 1987.
- Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Undang-undang Perpajakan 2000. Bandung: Citra Umbara, 2001
- Dinas Pendapatan Daerah 2002. Pemerintah Kota Surakarta, 2003.
- Wali Kota Surakarta. Lembaran Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Reklame. Surakarta: 2003.

Surakarta Dalam Angka. 2000, 2001, 2002. Surakarta: 2000, 2001, 2002.

Safri Nurmatu. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit, 2003.

Nugroho Budiyo. Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan. Yogyakarta: YKPN, 1993.

Suparmoko. Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE-UGM, 1980.

